

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Sumber : KORAN SINDO | Hari/Tgl : Kamis, 3 Feb 2022 | Hlm/Kol : 4/1-7 |
| Subjek : EKONOMI - INFLASI PANGAN | | Bidang : (UMUM) |

Kemiskinan dan Inflasi Pangan



KHUDORI

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), Peminat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi

”

Mereka yang posisinya hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan sontak bakal jatuh miskin manakala harga pangan naik dan jauh dari kemampuan daya beli.

Dua tahun pandemi, pemerintah sepertinya telah menemukan "pola" penanganan bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Kebijakan "rem" dan "gas" lewat pembatasan mobilitas warga terbukti tak terlalu menekan gerak ekonomi. Ini ditandai ekonomi yang terus tumbuh positif sejak triwulan II-2021. Hasil lain tampak dari penurunan angka kemiskinan yang dirilis 17 Januari 2022: dari 27,55 juta (10,19%) pada September 2020 menjadi 26,5 juta (9,71%) pada September 2021 atau turun 1,05 juta. Persentase kemiskinan kembali di bawah satu digit.

Prestasi ini tentu patut disyukuri. Langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional telah berada di jalur yang benar. Pertanyaannya, apakah penurunan kemiskinan akan terus berlangsung di masa-masa mendatang, termasuk setelah pandemi berubah menjadi endemi? Diakui atau tidak, dalam satu dekade terakhir penurunan angka kemiskinan amat lambat. Pada September 2012, jumlah orang miskin mencapai 28,71 (11,66%). Artinya, sepanjang 10 tahun terakhir jumlah orang miskin hanya turun 2,27

juta. Ini amat kecil.

Jumlah orang miskin tidak turun signifikan, salah satunya karena pola pengeluaran rumah tangga masih dominan pangan. Ini terpotret dari sumbangan garis kemiskinan makanan, yang per September 2021, persinya sebesar 74,05% dari pengeluaran rumah tangga. Hanya 25,95% pengeluaran nonmakanan. Implikasi kondisi ini, stabilitas harga pangan menjadi kebutuhan mutlak agar akses pangan warga, terutama yang miskin, tetap terjaga. Mereka yang posisinya hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan sontak bakal jatuh miskin manakala harga pangan naik dan jauh dari kemampuan daya beli. Naik-turunnya harga pangan akan berpengaruh langsung pada jumlah warga miskin.

Sialnya, harga bahan pangan dan makanan di negeri ini sangat fluktuatif, yang ujung-ujungnya membuat inflasi tinggi. Jika menengok angka inflasi, kesimpulan ini bisa megecoh. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi bisa ditekan rendah. Tapi jika diperiksa sumbernya terlihat akar masalahnya. Ditilik dari sumbernya, inflasi yang rendah karena kelompok harga yang diatur pemerintah (*admini-*

stered prices) dan inflasi inti terkendali. Sebaliknya, peran inflasi dari harga pangan (*volatile foods*) dominan. Sepanjang 2021, andil pangan (bahan pangan, serta pangan olahan, dan



KORAN SINDO/WAWAN BASTIAN

tembakau) dalam inflasi mencapai 42,24% dari inflasi 1,87%. Ini menandai instabilitas harga pangan masih jadi persoalan.

Ini setidaknya tercermin dari kenaikan harga berulang pada 2021 yang terjadi pada se-

Sambungan

Sumber : KORAN SINDO

Hari/Tgl : Kamis, 3 Feb 2022

Hlm/Kol : 4/1-7

jumlah komoditas pangan, seperti daging sapi, cabai (rawit dan merah), bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, dan ikan segar. Fluktuasi harga itu masih terasa hingga di awal 2022. Prahara harga pangan kini telah menjadi rutinitas tahunan, seperti penyakit akut yang sulit disembuhkan. Tidak terhitung sumber daya yang tergerus. Bangsa ini kehabisan waktu, tenaga, dan biaya besar untuk mengatasi hal-hal rutin yang mustinya bisa diselesaikan dengan cara-cara bijak, terukur, dan terencana.

Celaknya, stabilitas harga pangan masih jauh dari selesai. Ini tampak dari porsi inflasi pangan dalam inflasi total yang masih besar, setidaknya dalam 8 tahun terakhir. Pada 2014 andil pangan baru 40,31% dari inflasi nasional 8,36%. Namun, pada 2015 andil pangan pada inflasi naik jadi 61,19% dari inflasi 3,35%, dan naik lagi jadi 70,1% dari inflasi 3,01% pada 2016. Khusus 2017, andil pangan hanya 26% dari inflasi 3,61%. Setelah itu, andil inflasi pangan kembali naik: 43% dari 3,13% (2018), 56% dari 2,72%

(2019), dan 54% dari 1,68% (2020). Ini pertanda instabilitas harga pangan masih terjadi.

Nah, yang menarik, jika ditilik dari komoditas pangan penyumbang inflasi, tiga tahun terakhir mulai terjadi pergeseran. Rentang 2014-2018, posisi beras sebagai penyumbang inflasi mendominasi. Dari 11 komoditas pangan, dalam 5 tahun itu beras bersama daging ayam ras, ikan segar, dan mi menjadi penyumbang inflasi 4 kali, disusul telur ayam dan bawang merah (3x), cabai merah, cabai rawit, minyak goreng dan gula pasir (2x), dan bawang putih (1x). Posisi beras pun di urutan penting: 1-3 kontributor inflasi terbesar.

Tiga tahun terakhir (2019-2020), hanya pada 2020 beras jadi penyumbang inflasi pangan. Itu pun di posisi minor: 15 dari 20 komoditas. Sebaliknya, peran cabai (merah dan rawit), minyak goreng, bawang (merah dan putih), ikan segar, dan telur serta daging ayam mendominasi. Ini patut disyukuri. Sebab, dari 13 komoditas penyumbang garis kemiskinan makanan, posisi beras amat dominan: 22,04% dari pengeluaran rumah tangga miskin. Kala harga beras naik tinggi, hampir pasti jumlah orang miskin naik juga. Akan tetapi, pergeseran peran ini menandakan masalah inflasi

pangan masih jauh dari selesai.

Stabilitas harga pangan adalah sebuah keniscayaan. Bukan saja untuk memastikan perputaran roda ekonomi tapi juga bakal mendinginkan situasi sosial-politik. Lebih dari itu, bagi warga miskin, stabilitas harga jadi jaminan bagi mereka untuk bisa mengakses asupan makanan bergizi. Ketika harga melonjak tinggi, pangan tidak akan terjangkau oleh kantong mereka. Warga miskin, juga mereka yang masuk 40% berpenghasilan terbawah dan terkategori hampir/rentan miskin, mayoritas pengeluaran untuk pangan.

Fluktuasi harga pangan akan menekan daya beli konsumen. Bagi rakyat, terutama yang miskin, inflasi akan menggerogoti daya beli mereka. Inflasi akibat instabilitas harga pangan akan mengekspos mereka pada posisi yang rentan. Ini menjadi tantangan superserius bagi penciptaan SDM berkualitas di masa depan. Di saat prevalensi anak balita kurang gizi cukup memprihatinkan, yaitu 17,7% (18 dari setiap 100) dan 30% (1 dari 3) anak balita menderita kurang gizi dan tengkes, instabilitas harga pangan jadi soal krusial. Kala pandemi belum reda, instabilitas harga pangan kian memperdalam luka warga. □